

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wonogiri, ternyata masih terdapat banyak hal yang perlu untuk diperbaiki apabila dilihat dari implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital serta faktor yang mempengaruhinya. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital apabila dilihat dari proses pelaksanaannya dikatakan belum maksimal.

5.1.1 Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada dilihat dalam hal kualifikasi pelaksana dimana pelayanan Identitas Kependudukan Digital yang terjadi di Mal Pelayanan Publik hanya terjadi apabila masyarakat meminta untuk dibuatkan Identitas Kependudukan Digital, sehingga kualifikasi pelaksana staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang komunikatif kepada masyarakat.

5.1.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital meliputi:

- 1) Komunikasi dan Kegiatan Pelaksana: pemahaman masyarakat terkait Identitas Kependudukan Digital yang masih kurang sehingga muncul persepsi bahwa adanya Identitas Kependudukan Digital semakin memperumit masyarakat, informasi terkait Identitas Kependudukan Digital yang diberikan kepada masyarakat masih bersifat mendadak H-1 menjadikan ketidaksiapan masyarakat menerima informasi.
- 2) Karakteristik Agen Pelaksana: belum adanya pelayanan Publik seperti perbankan ataupun rumah sakit yang dapat menggunakan Identitas Kependudukan Digital hal tersebut mendorong minat masyarakat terkait kepemilikan Identitas Kependudukan Digital rendah dinilai tidak dapat digunakan seperti KTP-el.
- 3) Disposisi Implementor: sikap staff yang tidak responsive terhadap masyarakat terkait layanan Identitas Kependudukan Digital karena dianggap sulit menjawab pertanyaan masyarakat terkait manfaat Identitas Kependudukan Digital.

5.2 Saran

Berdasarkan adanya beberapa hambatan didalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

- 5.2.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri perlu melakukan pendataan untuk desa di bawah target nasional dengan membuka loket desa serta memberikan pendampingan kepada perangkat desa.
- 5.2.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan layanan keliling untuk pembuatan Identitas Kependudukan Digital guna membantu masyarakat terutama yang lansia untuk melakukan proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital.
- 5.2.3 Pihak Provinsi Jawa Tengah perlu menjalin kerjasama pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital di berbagai layanan publik seperti perbankan dan rumah sakit sehingga mampu dalam

mengintegrasikan data Identitas Kependudukan Digital dengan layanan publik pemerintah ataupun swasta.

- 5.2.4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri perlu melakukan mendisiplinkan staff untuk selalu responsive terhadap pelayanan Identitas Kependudukan Digital kepada pemohon.